

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak dan pertama kali di Indonesia. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah¹.

Pada pemilihan umum presiden di tahun 2019 ini hanya dapat menelurkan dua pasangan saja, akibat pengaturan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan *presidential threshold* 20% yang didasarkan pada hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya. Walaupun sebelumnya sempat diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi². Pada Pilpres 2019, dua calon presiden yang bertarung ialah calon presiden *petahana* yaitu Joko Widodo dan

¹Ratnia Solihah. (2018). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/jiip>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

²Achmadudin Rajab. (2017). *Batas Pencalonan Presiden Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, dalam Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

lawannya pada Pilpres 2014 yang lalu yaitu Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2019 ini, Joko Widodo memilih ketokohan Islam sebagai calon wakil presiden dengan menunjuk Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon pendampingnya. Sedangkan Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno, seorang pengusaha muda dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai calon wakil presidennya.

Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia yaitu berjumlah 207 juta orang, tentunya suara umat Islam dalam setiap pemilihan umum yang terjadi di Indonesia merupakan suara terbesar dan mayoritas. Oleh karena itu, kandidat terutama calon presiden yang bertarung dalam pemilihan presiden di Indonesia banyak melakukan manuver-manuver politik untuk merebut dukungan suara dari umat Islam di Indonesia. Hal ini berlangsung setelah reformasi tahun 1998 dan pasca amandemen UUD 1945 yang membuahkan hasil diadakan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden langsung oleh rakyat inilah yang menyebabkan suara umat Islam menjadi sasaran utama bagi para kandidat yang bertarung dalam pemilihan umum presiden di Indonesia.

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak

dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu³.

Menurut Ali Maschan Moesa, yang membahas antara agama dan politik, menjelaskan bahwa akan selalu ada tiga pilihan ketika menyandingkan antara agama dan politik. Tiga pilihan dimaksud itu adalah; (1) sangat dekat atau *integrated*, (2) simbiotik, dalam artian, antara agama dengan politik itu ada hubungan, namun tidak boleh terlalu dekat. Jadi, antara agama dan politik, ada jarak. Sedangkan model yang ke (3) adalah sekuler, yakni memisahkan sama sekali antara agama dan politik⁴.

Dalam hal ini, fenomena politik yang sering terjadi selama ini di Indonesia dan yang sering digunakan adalah kategori kedua, yakni simbiotik. Dalam artian, agama butuh negara. Jadi, garisnya saling membutuhkan. Namun sebenarnya harus dihindari kecenderungan yang terlalu dekat. Karena inti dari politik itu kekuasaan, sedangkan kekuasaan hanya terbatas, maka yang terjadi cenderung dengan konflik. Namun gerakan politik agama termasuk yang baru-baru ini terjadi di Indonesia menimbulkan stigma bahwa gerakan politik agama akan memberikan dampak bagi kepentingan para elite politik.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h.227.

⁴Ali Maschan Moesa. (2007). *Kiai Berpolitik Tidak Dilarang*, Aula No. 03. Maret, <http://mediaaula.blogspot.com>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

Hal ini juga ditunjukkan dari hasil pemilihan umum yang berlangsung pasca reformasi, dimana pemilihan umum pertama ini banyak menciptakan partai politik berlandaskan agama seperti partai-partai Islam. Gerakan politik Partai Islam ini memberikan pengaruh pada terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama yang dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR. Koalisi Partai Islam berhasil memenangkan calon yang diusung melawan Koalisi Partai Nasionalis. Ini menunjukkan bahwa suara umat Islam merupakan salah satu suara yang sangat menentukan dalam ajang pemilihan presiden dan gerakan-gerakan politik yang dilakukan umat Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena gerakan ini mampu memberikan dampak terhadap hasil pemilihan presiden.

Peta baru gerakan politik Islam di Indonesia terjadi pada pemilihan umum 2019 ini yang ditunjukkan dari adanya gerakan Aksi Bela Islam yang baru dilakukan pada tanggal 2 Desember 2018. Aksi Bela Islam sendiri pertama kali terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 atau lebih dikenal sebagai Aksi 212 yang merupakan kulminasi dari gerakan turun ke jalan yang dilakukan umat Islam untuk menuntut proses hukum terhadap gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Gerakan masif ini berpusat di halaman Monumen Nasional (Monas) yang dihadiri oleh umat Islam dari berbagai kalangan baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Aksi ini dilakukan dengan demo

yang diisi orasi dan doa bersama yang dihadiri sekitar tiga juta peserta⁵. Gerakan Aksi 212 ini dipicu oleh kemarahan Umat Islam khususnya di Jakarta yang mempermasalahkan penggunaan surat Al-Maidah Ayat 51 dalam kampanye Ahok di Kepulauan Seribu. Aksi ini juga mendapat peliputan berita yang besar dari berbagai media baik dari dalam dan maupun luar negeri⁶.

Salah satu pencetus gerakan 212 ini adalah Dr. Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, Lc, M.A, DPMSS atau yang biasa disapa Habib Rizieq Shihab yang merupakan seorang tokoh Islam Indonesia dan dikenal sebagai pemimpin dan pendiri organisasi Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq Shihab merupakan seorang tokoh agama ternama, sebutan Habib untuknya merupakan sebuah gelar yang dihormati oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya bagi FPI.

Habib Rizieq adalah anak kelima dari lima bersaudara, ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965 dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad Shihab dan Syarifah Sidah Alatas. Kedua orangtuanya merupakan orang Betawi keturunan Hadhrami. Ayahnya, Habib Husein bin Muhammad bin Husein bin Abdullah bin Husein bin Muhammad bin Shaikh bin Muhammad Shihab adalah salah seorang pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia yang didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Pandu Arab Indonesia adalah sebuah

⁵F. Rozie, (2016). *GNPF MUI: Peserta Demo 2 Desember Capai 3 Juta Orang*, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/2664951>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

⁶G. Abdul. (2016). *Tentang Tafsir Surat Al Maidah 51 dan Ahok Jadi Tersangka*, Bintang, <https://www.bintang.com/lifestyle/read/2653432/>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia berketurunan Arab yang berada di Jakarta, yang selanjutnya berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia. Rizieq adalah seorang Habib atau Sayyid dengan klan Shihab (merujuk pada Shihabuddin Aal bin Syech) yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Imam Ahmad al-Muhajir. Sementara itu, istrinya yang bernama Syarifah Fadhlun juga merupakan keluarga Sayyid dari klan Aal bin Yahya.

Pada tahun 1983, Rizieq mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Namun setelah satu tahun menempuh studi, ia mendapat tawaran beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk kuliah di Arab Saudi. Ia pun melanjutkan program sarjana jurusan Studi Agama Islam (Fiqh dan Ushul Fiqh) ke King Saud University yang ditempuhnya selama empat tahun. Pada tahun 1990, Habib Rizieq dinyatakan lulus, lengkap dengan predikat *Cum Laude*.

Organisasi Front Pembela Islam (FPI) secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di pondok pesantren Al-Um Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI ini didirikan oleh sejumlah haba'ib, ulama', muballigh, serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab. Tidak hanya di Jakarta, seiring berjalannya waktu, simpatisan FPI bertambah banyak

dan mendirikan FPI di daerah-daerah, Seperti di Surakarta, Bandung dan Yogyakarta hingga hampir di setiap kota di Indonesia⁷.

Habib Rizieq Shihab mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia saat aksinya dalam membela agama islam dimana pada saat beredarnya video Ahok di kepulauan seribu yang dianggap melecehkan surat dari kitab Al-Quran. Ahok dianggap melecehkan surat Al-Maidah, dimana dalam kunjungan tersebut Ahok menyampaikan sambutan kepada masyarakat kepulauan seribu dan mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak milih saya, ya dibohongin pakai surat Al-Maidah surat 51....” Dalam perkataan tersebut banyak masyarakat muslim di Indonesia merasa bahwa kitab mereka seperti dilecehkan. Habib Rizieq Shihab sebagai pemimpin ormas FPI mulai mengadakan aksi demo yang dinamai dengan aksi 212 atau Aksi Bela Islam terkait kasus Ahok tersebut. Habib Rizieq Shihab merupakan orang terdepan yang menegaskan Ahok melakukan pelecehan agama, padahal dalam kasus tersebut masih belum jelas sampai pada akhirnya Ahok di penjara atas kasus tersebut⁸.

Pemberitaan tentang Habib Rizieq Shihab mulai muncul dan panas kembali terkait munculnya pemberitaan terkait balada cinta Habib Rizieq Shihab di media sosial maupun media *online*. Muncul sebuah pemberitaan yang

⁷Jajang Jahroni Jamhari. (2004). *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.132

⁸Rohmatul Izad. (2017). *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jilid II Pada 4 November 2016)*, <https://ejournal.uin.suka.ac.id/pusat/download>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

mengatakan bahwa ketua FPI tersebut terduga melakukan *chat sex* dengan Firza Husein yang merupakan murid di pengajiannya. Habib Rizieq Shihab tertuduh sebagai pelaku karena dalam pemberitaan yang dimuat tersebut terpampang nama kontak *whatsapp* Habib Rizieq Shihab beserta Firza Husein. Penanganan dari pihak kepolisian menghasilkan bahwa *chat* tersebut bukanlah *hoax* melainkan asli. Habib Rizieq Shihab dinyatakan sebagai tersangka karena melanggar tentang UU Pornografi⁹.

Kasus balada cinda Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein muncul setelah Aksi Bela Islam diadakan yang dipelopori salah satunya oleh Habib Rizieq Shihab. Hal inilah menyebabkan pendukung maupun pihak-pihak yang pro terhadap Habib Rizieq Shihab menganggap ini sebagai kriminalisasi ulama oleh pihak-pihak yang bertentangan dengan Aksi Bela Islam atau gerakan 212. Kasus inilah yang menyebabkan sentimen negatif alumni 212 terutama pihak-pihak yang pro terhadap Habib Rizieq Shihab mengarah kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Oleh karena itu, gerakan politik islam ini semakin menguat dan membawa isu-isu persoalan Islam yang setidaknya memberikan dampak dan efek bagi pihak pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Melihat realitas sosial yang demikian, figur ulama seringkali dijadikan momentum para elite politik untuk merangkul ulama masuk dalam partai, mereka merasa kurang lengkap jika tidak melibatkan ulama ataupun sekedar untuk

⁹Siswanto, et al. (2017). *Rizieq Jadi Tersangka Kasus Chat Sex, Banyak Yang Tersinggung*, <https://www.suara.com/news/>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

meminta restu ulama yang notabene dianggap sebagai tokoh spritual. Tentu dengan berbagai caranya dan janji-janji politik yang menjadi bius sosial. Peranan penting seorang ulama dalam kehidupan beragama di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Dari realitas sosial inilah, diakui atau tidak, sosok ulama memiliki *power* serta otoritas yang cukup tinggi untuk memobilisasi massa¹⁰. Asumsi ini diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi selama ini, misalnya, setiap partai peserta pemilihan umum, mencoba memanfaatkan ulama sebagai juru kampanye untuk meningkatkan perolehan suara partainya. Pengaruh ulama tentu saja begitu luas, terutama di kalangan umat Islam yang sering mengikuti langkah-langkah politik para ulama. Di era reformasi dan otonomi daerah ini, peran itu semakin jelas terlihat.

Fenomena politik yang terjadi pada tahun 2018 dimana tahap pencalonan presiden dimulai, muncul Ijtima Ulama yang salah satu pelopor dan pencetusnya adalah Habib Rizieq Shihab dan ulama-ulama yang tergabung dalam alumni 212. Berdasarkan hasil Ijtima Ulama dan sekaligus rekomendasi dari Habib Rizieq Shihab yang berada di Arab Saudi menunjukkan dukungan penuh ulama-ulama yang tergabung dalam alumni 212 kepada calon presiden Prabowo Subianto dengan merekomendasi calon-calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam pertarungan Pilpres 2019. Namun, calon-calon wakil presiden

¹⁰Mien Ahmad Rifai. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja*. Yogyakarta: Pilar Media, h.108.

yang direkomendasikan tersebut tidak ada yang dipilih. Calon presiden Prabowo Subianto menunjuk Sandiaga Salahudin Uno sebagai wakil presiden.

Setelah Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno mendaftar dan dinyatakan lolos sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto menandatangani pakta integritas yang dibuat dan dihasilkan oleh Ijtima Ulama yang memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Salah satu isi yang paling penting dalam pakta integritas tersebut adalah memulangkan kembali Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Para Habib, pemimpin-pemimpin kelompok islam dari komunitas *Sayyid* atau keturunan Nabi Muhammad, memiliki peran yang lebih besar di kancah perpolitikan Indonesia salah satunya Habib Rizieq Shihab. Meskipun Habib Rizieq berada di pengasingan di Arab Saudi, dia masih berkampanye melalui media sosial dan pengikutnya tetap setia, yakin bahwa dia telah ditargetkan dengan tuduhan palsu oleh rezim pemerintahan saat ini. Selama tidak ada tokoh karismatik yang kuat muncul dari organisasi Sayyid alternatif seperti Majelis Rasulullah atau Al-Fachriyah, Habib Rizieq Shihab akan terus menjadi habib yang paling berpengaruh di Indonesia khususnya Jakarta¹¹.

Sosok Rizieq Shihab diyakini akan menjadi kejutan dengan menggiring perolehan suara untuk salah satu pasangan calon. Ketua FPI itu diyakini akan

¹¹Ahmad Syarif Syechbubakr. (2017). *Peran Para Habib Islam: Koneksi Yaman di Kancah Politik Jakarta*, <https://www.matamatapolitik.com>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

berpihak kepada Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Salah satu amunisi yang mungkin menjadi titik balik pasangan Prabowo-Sandi adalah dukungan ulama dengan salah satu simbolnya yaitu Habib Rizieq. Prabowo-Sandi butuh satu gebrakan yang besar menarik dukungan pemilih Islam untuk pasangan ini.

Meski calon presiden *petahana* Joko Widodo yang merupakan lawan Prabowo memilih KH Ma'ruf Amin sebagai Cawapres. Suara umat Islam belum tentu berpindah ke pasangan ini. KH. Ma'ruf Amin hanya akan menutupi kelemahan Joko Widodo pada isu keislaman tetapi belum tentu mampu menarik dukungan umat Islam termasuk dalam hal ini ulama ke pasangan Jokowi-Mar'uf karena akan ditentukan oleh dukungan utama yang salah satunya adalah Habib Rizieq Shihab.

Bagi pihak oposisi pemerintah, posisi Habib Rizieq Shihab diakui memang sangat penting. Dia terlanjur menjadi simbol kemenangan politik dengan kemampuan membolak-balik semua ramalan. Maka tidak heran apabila berbagai pihak dari partai oposisi pemerintah satu per satu merapat ke Habib Rizieq Shihab dan kelompok asosiasinya menjelang Pilpres 2019. termasuk salah satunya Partai Gerindra. Pertemuan para elite politik dari oposisi pemerintah menghasilkan amanat khusus dari Habib Rizieq Shihab agar empat partai umat yaitu PKS, Gerindra, PAN, PBB berkoalisi dalam Pemilu Presiden 2019¹².

¹²Ninis Chairunnisa. (2018). *Rizieq Shihab Minta Empat Partai Ini Bentuk Koalisi*, <https://nasional.tempo.co/>, Diakses tanggal 13 Januari 2019.

Sementara beberapa orang di lingkaran pemerintahan Jokowi berkali-kali menemui Habib Rizieq Shihab di Mekkah antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan. Tentu saja, pertemuan-pertemuan itu berlangsung tertutup dan menganggap Habib Rizieq Shihab penting untuk dirangkul. Pihak Istana tidak menutup mata bahwa meski Habib Rizieq Shihab berada jauh di Arab Saudi, sosoknya masih ampuh untuk menggiring opini massa di Indonesia. Salah satu yang berperan penting sebagai mediator antara Jokowi dan Rizieq adalah Usamah Hisyam, Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 yang juga memimpin pertemuan para ulama dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada bulan April 2018. Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang juga pengusaha di bidang media itu sudah tiga kali bolak-balik Indonesia-Arab Saudi untuk menjembatani komunikasi kedua kubu¹³.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggapan Partai Gerindra Dan PDIP Terhadap Figur Habib Rizieq Shihab (Studi Kasus di Kota Palembang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan terhadap Habib Rizieq Shihab?

¹³Tim Editor. (2018). *Berebut Hati Rizieq*, <https://m.kumparan.com/@kumparannews>, Diakses tanggal 13 Januari 2019.

2. Bagaimana posisi Habib Rizieq Shihab dalam kepentingan politik calon presiden RI pada Pilpres 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggapan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan terhadap Habib Rizieq Shihab.
2. Untuk mengetahui posisi Habib Rizieq Shihab dalam kepentingan politik calon presiden RI pada Pilpres 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya di bidang ilmu politik, karena penelitian ini menjelaskan tentang figur politik seorang tokoh dalam kepentingan politik calon presiden pada pemilihan umum presiden.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu proses pembelajaran secara akademik dalam lingkungan perguruan tinggi terutama khususnya di bidang kajian ilmu politik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan juga bisa berguna bagi pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden sebagai masukan yang berharga dan bersifat ilmiah dalam menghadapi pemilihan umum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya peran dari seorang tokoh yang dapat memberikan dampak terhadap hasil pemilihan umum.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai figur politik dalam kepentingan calon presiden merupakan hal yang baru di Indonesia. Penelitian mengenai hal ini belum pernah dilakukan namun di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa literatur karya ilmiah yang membahas dan memiliki keterkaitan dengan tema fenomena politik, kepentingan politik dan pemilihan umum 2019, di antaranya:

Penelitian yang membahas mengenai fenomena politik adalah jurnal penelitian Abdurrahman yang berjudul “Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik”. Penelitian ini menjelaskan ketika realitas-empiris telah menunjuk pada kian maraknya para kiai yang terjun dalam dunia politik, langkah bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembalikan pada kiai yang bersangkutan. Bilamana seorang kiai sudah terlalu dekat dengan kekuasaan, tanpa bermaksud berburuk sangka yang dikhawatirkan malah menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Sejatinya, politik dapat dijadikan sebagai media. Sehingga agama dapat berfungsi sebagai instrumen bagi kekuasaan. Bagi seorang kiai plus politisi, hendaknya mampu menjalankan kedua profesinya secara ikhlas dan istiqomah. Jika tidak, pengaruh kiai menjadi tidak

bermakna, ketika otoritasnya dianggap telah menyimpang dari apa yang seharusnya¹⁴.

Penelitian lain yang membahas mengenai fenomena politik adalah Jurnal Penelitian Ahmad Sholikin yang berjudul “*Islamic Political Movement in Indonesia After “Aksi Bela Islam Jilid I, II and III”*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, fragmentasi otoritas keagamaan telah terjadi paska Aksi Bela Islam. NU dan Muhammadiyah bukan lagi pemegang otoritas tunggal dalam persoalan agama di Indonesia. Selain adanya fragmentasi otoritas keagamaan tulisan ini menyatakan bahwa ABI merupakan sebuah “gerakan protes” dan “aksi solidaritas” yang akselerasinya menguat dalam konteks isu domestik, yaitu Pemilihan Gubernur Jakarta, yang rentan untuk dapat menjaga isunya dalam jangka panjang. Sehingga untuk bisa merubah peta gerakan politik Islam yang kuat dibutuhkan sebuah pondasi yang kuat dari para penggagas Aksi Bela Islam tersebut¹⁵.

Penelitian yang membahas mengenai kepentingan politik adalah jurnal penelitian Ferry Irawan Febriansyah yang berjudul “Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam politik hukum, wewenang yang diberikan kepada para elit politik untuk

¹⁴Abdurrahman. (2009). *Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik*, Karsa, Vol. XV No. 1 April, <https://ejournal.stainpamekasan.ac.id>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

¹⁵Ahmad Sholikin. (2011). *Islamic Political Movement in Indonesia After “Aksi Bela Islam Jilid I, II and III*, Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10 No. 1, <https://ejournal.unisda.ac.id/article/view/>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

membentuk suatu peraturan seringkali dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik mereka. Keinginan masyarakat tertuju pada keadilan yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kepastian hanya tergantung dari muatan kepentingan politik maka kualitas undang-undang patut diragukan. Kesejahteraan tidak akan tercapai jika kualitas undang-undang dilandasi muatan kepentingan-kepentingan politik bukan kepentingan masyarakat banyak. Jika sudah terjadi demikian, maka konstitusi hanya menjadi hiasan negara bukan menjadi pedoman dalam menciptakan undang-undang demi kepastian, keadilan dan manfaat¹⁶.

Penelitian yang membahas mengenai Pemilihan Umum Presiden 2019 adalah makalah penelitian Ratnia Solihah yang berjudul “Peluang dan tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik”. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pemilihan umum 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik, yang dalam makalah ini dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana

¹⁶Ferry Irawan Febriansyah. (2012). *Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang*. Perspektif, Volume XVII No. 3, <http://researchgate.net/publication>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif¹⁷.

Karya ilmiah lain yang membahas mengenai Pemilihan Umum Presiden 2019 adalah artikel Nur Rohim Yunus yang berjudul “*Coattail Effect* Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019”. Artikel ini menjelaskan Kompetisi dalam perhelatan akbar pemilihan presiden 2019 tentunya tidak kalah seru, dan efek *coattail* pun sudah menjadi prediksi yang dipikirkan jauh-jauh hari oleh para partai pengusung. Dengan mendukung Jokowi atau Prabowo diharapkan partai-partai politik tersebut mendapat insentif elektoral. Minimal perolehan suara partai tidak menurun dibanding pemilu sebelumnya. Tak hanya itu, kerja politik mengais pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai di pemilu juga terlihat ketika partai pendukung capres berlomba-lomba menyorongkan cawapres. Dengan kadernya menjadi cawapres Jokowi atau Prabowo mereka berharap insentif elektoral mampu didapatkan secara maksimal¹⁸.

¹⁷Ratnia Solihah. *op.cit.*

¹⁸Nur Rohim Yunus. (2018). *Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019*, Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 8e, <https://download.garuda.ristekdikti.go.id>, Diakses tanggal 22 Desember 2018

F. Kerangka Teori

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁹ Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁰

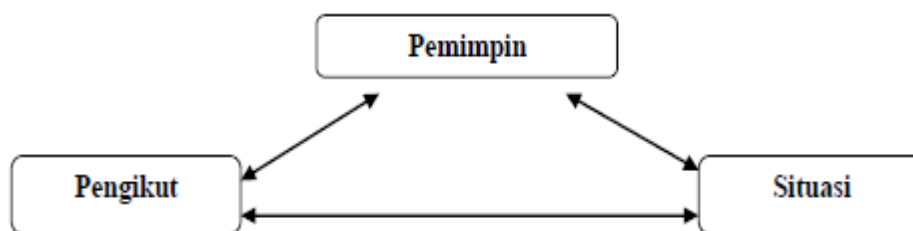
Dengan adanya definisi dari Deliar Noer maupun Miriam Budiardjo, pada prinsipnya mengandung persamaan, di mana kedua pakar ini melihat politik sebagai suatu kegiatan, namun ada perbedaan dalam hal bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas. Sedangkan konsep Miriam Budiardjo, mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya.

¹⁹Deliar Noer. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali. h. 6

²⁰Miriam Budiardjo. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. h. 8

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.²¹

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 1. Unsur-Unsur Kekuasaan

Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga

²¹Imam Hidayat. (2009). *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA Press, h. 31.

kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen di atas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.²² Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan di atas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence*, *persuasion*, dan *coercion*.

²²*Ibid*, h. 32-33

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural *talcoot parsons*. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya²³. Politik demikian dapat disimpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan²⁴.

Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat²⁵. Jenis *authority* yang disebutnya dengan *rational legal authority* sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikianini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya²⁶.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu penelitian, terutama dalam

²³Rafael Raga Maran. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 190

²⁴A. Hoogerwerf. (1985). *Politikologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 44

²⁵Hotman Siahaan. (1986). *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 201

²⁶George Ritzer dan Douglad J. Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, h. 37

mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Berikut penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis Tanggapan Partai Gerindra dan PDIP Terhadap Figur Habib Rizieq Shihab. Metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, peneliti langsung terjun dan berinteraksi dengan obyek di lapangan serta menggambarkan kondisi atau hasil temuan masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi²⁷. Jadi tujuan dari metodologi kualitatif bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara teliti terhadap suatu masalah yang kemudian data temuannya dideskripsikan²⁸.

Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Tanggapan Partai Gerindra dan PDIP Terhadap Figur Habib Rizieq Shihab (Studi Kasus Kota Palembang).

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

²⁷Septiawan Santana. (2007). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 27

²⁸Lexy J. Meleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, h. 5

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran peneliti yang melakukan wawancara dengan para informan, penulis menggunakan alat rekam dan alat tulis sebagai alat bantu. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pengamat Politik Palembang
- 2) Tim Kampanye Jokowi-Mar'uf Palembang
- 3) Tim Kampanye Prabowo-Sandi Palembang
- 4) Front Pembela Islam Kota Palembang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh dari studi keputusan melalui data literatur yang telah ada. Studi keputusan ini dimaksudkan untuk memperoleh teori, konsep maupun keterangan-keterangan melalui hasil penelitian, buku-buku, majalah, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal yang dibutuhkan peneliti yang dibutuhkan untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi tersebut berupa segala informasi yang dihimpun melalui buku-buku, jurnal, buletin, bahan dari internet maupun surat kabar.

b. Wawancara

Yaitu wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau sumber data yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memperoleh informasi yang jelas tentang tanggapan Partai Gerindra dan PDIP terhadap figur Habib Rizieq Shihab. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber informasi dengan cara penelitian kualitatif di Kota Palembang dan sekitarnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palembang sesuai dengan masing-masing tempat informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pengamat Politik Palembang

Pengamat politik yang dijadikan informan dalam penelitian ada dua orang yaitu Ardian Saputra dari Universitas Sriwijaya dan Joko Siswanto dari Universitas Taman Siswa Palembang

b. Tim Kampanye Jokowi-Mar'uf Palembang

Tim Kampanye Daerah Jokowi-Mar'uf Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Pangeran Ratu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang

c. Tim Kampanye Prabowo-Sandi Palembang

Tim Kampanye Daerah Prabowo Sandi Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Jalan R. Soekamto Kota Palembang

d. Front Pembela Islam Kota Palembang

Dewan Perwakilan Daerah Front Pembela Islam Sumatera Selatan berlokasi di Lorong Gubah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat dekriptif. Analisis deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif. Untuk menganalisis berbagai fenomena dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut²⁹:

²⁹Matthew B Miles dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, h. 10-17

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan tersusun pola hubungannya, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan dalam penelitian, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan dari tanggapan Partai Gerindra dan PDIP terhadap figur Habib Rizieq Shihab. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya.